

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi berperan dalam kegiatan manajemen keuangan suatu organisasi baik itu organisasi yang berorientasi pada laba maupun organisasi nonlaba. Peran akuntansi paling dasar adalah kemampuannya dalam menyajikan informasi mengenai segala kegiatan keuangan. Pada dasarnya organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Walaupun organisasi nonlaba tidak bertujuan untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, namun masih bersinggungan dengan persoalan keuangan karena organisasi nonlaba memiliki anggaran, kewajiban membayar gaji karyawan, membayar tagihan listrik serta telepon, dan urusan keuangan lainnya.

Organisasi nonlaba merupakan organisasi jasa yang berbeda dengan organisasi swasta, tujuan dari lembaga-lembaga ini adalah memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, spiritualitas dan kesehatan masyarakat. Berbeda dengan organisasi laba yang tujuannya mencari keuntungan. Salah satu bentuk organisasi sektor publik yang tergabung dalam organisasi nonlaba yaitu masjid, sebagai tempat beribadah, menuntut ilmu agama, serta digunakan sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan sebagian harta seseorang untuk bersedekah. Masjid memiliki laporan keuangan sebagai cara menghimpun dana dari para donatur untuk mengatur dan melaporkan segala kegiatan yang dilaksanakan demi kemakmuran masjid. Dana yang diterima masjid dari donatur tidak dimaksudkan untuk memberikan imbalan apapun (Djailani & Rondonuwu, 2022). Dalam menaruh sebagian harta dengan rasa kepercayaan dan ikhlas kepada pengurus masjid untuk digunakan mendanai kegiatan operasional, pembangunan masjid dan kegiatan agama lebih

baik dan tidak memiliki rasa untuk menikmati keuntungan imbal balik pada masjid, melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masjid dan jamaah dalam beribadah. Meningkatkan aspek kemajuan masjid lebih baik pada sistem keuangan yang baik tentu akan mempermudah pengurus masjid atau takmir dalam mengambil keputusan terkait pembangunan pengelolaan dan pemberdayaan masjid (Lating 2022).

Seiring dengan kemudahan akses untuk melakukan pengkajian terhadap berbagai permasalahan, peran organisasi nonlaba yang digerakkan oleh masyarakat semakin penting. Nyatanya, perkembangan organisasi nonlaba saat ini berlangsung dengan pesat, bahkan melibatkan anggaran yang cukup signifikan. Melalui laporan keuangan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai keadaan pendanaan suatu organisasi nonlaba. Di era teknologi yang serba canggih ini, transparansi dan akuntabilitas semakin menjadi harapan dalam setiap laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nonlaba memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja keuangan yang telah dijalankan selama ini.

Penyajian laporan keuangan pada masjid seringkali dihadapkan pada dilema antara menjadi lebih profesional dan akuntabel sesuai standar atau tetap bertahan dengan mengandalkan rasa saling percaya diantara sesama pengurus atau pengelola (Diviana et al., 2020).

Kuangan masjid sebagian besar berasal dari jamaah atas infaq, hingga dana hibah pemerintah, sehingga kepastian penjelasan terarah dana digunakan dalam kemakmuran operasional masjid menjadi pertanyaan yang diharapkan transparansi. Dengan melihat masjid yang memiliki laporan keuangan secara jelas dan akurat

digunakan sebagai kemakmuran masjid secara nyata memiliki daya tarik kepercayaan jamaah yang lebih tinggi dalam memberikan sumbangan dan infaq pada masjid, yang diartikan bahwa aliran dana jelas dalam penganggaran dan realisasi secara amanah. Dalam perkembangan pengelolaan keuangan entitas nonlaba sangatlah diperlukannya dasar atau standar akuntansi keuangan yang jelas sebagai panduan dalam pelaporan keuangan entitas nonlaba (Maulana & Rahmat, 2021).

Laporan keuangan organisasi nonlaba berbeda dengan laporan keuangan entitas bisnis pada umumnya. Penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba semenjak tahun 1997 menggunakan acuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun tepat pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) resmi mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 untuk menggantikan PSAK 45 melalui penerbitan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) 13 (Ikatan Akuntansi Indonesia 2019). Hal ini dilandasi dengan sebagai dampak dari proses konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berakibat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis Industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain (Ikatan Akuntansi Indonesia 2018).

Penerapan ISAK 335 dapat dilakukan melalui penelitian dan edukasi kepada staf keuangan tentang ISAK 335 dan bagaimana penerapannya dalam laporan keuangan agar. Selain itu, penyesuaian sistem akuntansi juga dapat mendukung penyajian laporan keuangan agar sesuai berdasarkan ISAK 335. Evaluasi dan audit

secara rutin terhadap penerapan ISAK 335 dapat dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah di audit oleh auditor independent.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan laporan keuangan organisasi nonlaba, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berinisiatif dengan mengeluarkan pedoman pencatatan akuntansi dan laporan keuangan organisasi nonlaba yang dikenal dengan ISAK 335 yang mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2020. ISAK 335 yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini mengatur mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Pedoman ini mengatur mengenai penyajian, pengakuan, dan pengungkapan laporan keuangan organisasi nonlaba. Dalam prinsipnya, laporan keuangan organisasi nonlaba memiliki lima laporan keuangan yang harus disajikan yaitu: (1) Laporan Posisi Keuangan; (2) Laporan penghasilan komprehensif; (3) Laporan perubahan aset neto; (4) Laporan arus kas; (5) Catatan atas laporan keuangan.

Meskipun sudah ada standar laporan keuangan organisasi non laba, namun pada kenyataanya masih banyak organisasi atau entitas khususnya yang berorientasi non laba yang belum efisien dalam penerapan prosedur penyajian keuangan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai pedoman yang berlaku terhadap masyarakat terutama pihak organisasi non laba yang berkepentingan. Pedoman ISAK 335 ini hanya disosialisasikan kepada kalangan praktisi dan mahasiswa melalui webinar yang diadakan IAI, yang mana tidak semua organisasi atau entitas non laba mengetahui informasi tersebut terlebih lagi organisasi yang masih belum berkembang.

Sehingga dari hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia entitas organisasi yang berorientasi non laba dalam penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 masih belum menyeluruh dan belum maksimal dalam menyajikannya. Adapun faktor yang mempengaruhi faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tidak mengetahui adanya aturan baru.

Penelitian ini fokus pada organisasi nonlaba yakni pada sektor organisasi masjid. Hal ini dikarenakan pada organisasi yang berorientasi pada laba mayoritas sudah menerapkan standar pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lain halnya dengan organisasi nonlaba yang belum banyak menerapkan standar penyajian laporan keuangan yang termaktub dalam ISAK 335 Penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis hal ini dikarenakan masing-masing jenis organisasi tersebut memiliki standar tersendiri dalam penyajian laporan keuangannya.

Masyarakat awam seringkali beranggapan bahwa laporan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi laba maupun nonlaba adalah sama. Padahal dalam laporan keuangan organisasi nonlaba yang berisi tentang dana atau Masyarakat awam seringkali beranggapan bahwa laporan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi laba maupun nonlaba adalah sama. Padahal dalam laporan keuangan organisasi nonlaba yang berisi tentang dana atau sumbangan dari berbagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pihak internal dan pihak eksternal. Organisasi nonlaba di Indonesia saat ini masih cenderung

menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah organisasi.

Hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti pada Januari 2025 dengan selaku ketua DKM Pak Tarlani Masjid Al-Muhajirin Nuansa Valley Regency mengatakan bahwa “Dalam penulisan laporan keuangan di masjid Al-Muhajirin Nuansa Valley Regency disini kami masih menggunakan bahasa setempat saja agar mudah dipahami oleh orang sekitar, jadi belum memakai bahasa akuntansi” Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangannya, Masjid Al-Muhajirin inipun sudah menyajikan laporan keuangan dengan sebaik mungkin, hanya saja masih ada ketidaksesuaian dengan ISAK 335.

Adapun salah satu contoh bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh Masjid Al-Muhajirin Nuansa Valley Regency sebagai berikut:

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Masjid Al-Muhajirin

LAPORAN KEUANGAN DKM AL-MUHAIJIRIN 5 JANUARI – 11 JANUARI 2024	
SALDO AWAL	Xxxx
Saldo Awal Bank	Xxxx
Donasi Palestina	Xxxx
Saldo Awal Kas Masjid	Xxxx
JUMLAH SALDO AWAL	Xxxx

PEMASUKAN	Xxxx
Penarikan Kenceng Masjid	Xxxx
Penarikan Kenceng Hari Jumat	Xxxx
JUMLAH PEMASUKAN	Xxxx
PENGELUARAN	Xxxx
Operasional Masjid	Xxxx
JUMLAH PENGELUARAN	Xxxx
SALDO AKHIR	Xxxx
Saldo Akhir Bank	Xxxx
Donasi Palestina	Xxxx
Saldo Akhir Kas Masjid	Xxxx
JUMLAH SALDO AKHIR	Xxxx

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Al-Muhajirin 2024

Data tersebut adalah data laporan keuangan yang disajikan oleh Masjid Al-Muhajirin. Dari hasil temuan peneliti, peneliti menemukan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan masjid ini hanya menyajikan satu laporan saja yaitu, Laporan Umum Kas Keuangan yang mana laporan tersebut masih sangat sederhana karena hanya menyajikan laporan arus kas masuk dan keluar saja, sehingga masih sulit dalam mengetahui performa laporan keuangan masjid Al-Muhajirin ini.

Dengan demikian Masjid Al-Muhajirin sudah menyajikan laporan keuangan, namun dalam penyajiannya belum mengikuti pedoman ISAK 335, Adapun permasalahan yang teridentifikasi yaitu:

Pertama, laporan keuangan yang hanya mencatat arus kas masuk dan keluar tanpa menggunakan basis akrual menyebabkan ketidakakuratan dalam menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, seperti ketidakmampuan mengidentifikasi utang atau piutang yang belum tertagih. Selain itu, minimnya pencatatan transaksi secara rinci dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, tidak adanya Laporan Posisi Keuangan (neraca) membuat pengurus dan jamaah tidak memiliki informasi mengenai aset, kewajiban, dan kekayaan bersih masjid. Dampaknya, pengelolaan aset seperti tanah wakaf atau bangunan menjadi tidak terdokumentasi dengan baik, berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan. Tanpa laporan ini, perencanaan keuangan jangka panjang juga menjadi sulit dilakukan, seperti menentukan kemampuan masjid dalam membiayai renovasi atau program sosial.

Ketiga, ketiadaan Laporan Perubahan Aset Neto menyebabkan ketidakmampuan dalam mengevaluasi kinerja keuangan masjid dari waktu ke waktu. Donatur dan pengurus tidak bisa melihat apakah dana yang terkumpul digunakan secara efektif atau justru mengalami pemborosan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya partisipasi dalam berinfaq atau sedekah.

Keempat, tidak disajikannya Laporan Penghasilan Komprehensif mengakibatkan ketidakjelasan dalam klasifikasi pendapatan dan beban. Misalnya,

dana zakat yang seharusnya dikhususkan untuk mustahik mungkin tercampur dengan dana infaq untuk operasional masjid. Pelanggaran seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terakhir, tidak adanya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) membuat informasi keuangan menjadi tidak lengkap. CaLK seharusnya memberikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi, nilai aset, dan kewajiban yang mungkin timbul. Tanpa ini, risiko kesalahan penyajian laporan keuangan semakin tinggi, dan masjid bisa menghadapi masalah hukum jika terdapat kewajiban yang tidak diungkapkan.

Secara keseluruhan, ketidakpatuhan terhadap ISAK 35 tidak hanya berdampak pada buruknya tata kelola keuangan, tetapi juga merusak reputasi masjid di mata jamaah, donatur, dan otoritas terkait. Jika tidak diperbaiki, hal ini dapat mengurangi dukungan finansial dari masyarakat dan menghambat perkembangan masjid dalam menjalankan program-programnya. Oleh karena itu, penting bagi pengurus untuk segera melakukan pembenahan dengan menerapkan standar akuntansi yang berlaku, meningkatkan transparansi, dan melibatkan pihak auditor jika diperlukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dimana laporan keuangan Masjid-Al Muhaijirin masih banyak yang belum sesuai dengan standar ISAK 335, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN ISAK 335 TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA (Studi kasus pada Masjid AL-Muhaijirin**

Nuansa Valley Regency Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ISAK 335 pada laporan keuangan di Masjid Al-Muhajirin?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan penerapan ISAK 335 pada Masjid Al-Muhajirin?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris, yaitu:

1. Mengetahui kesesuaian penerapan ISAK 335 pada laporan keuangan di Masjid Al-Muhajirin.
2. Mengetahui hambatan penerapan laporan keuangan pada Masjid Al-Muhajirin berdasarkan ISAK 335.

C. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta membantu mengembangkan data teoritis yang actual terkait penyajian laporan keuangan lembaga yang berorientasi nirlaba sesuai dengan aturan ISAK 335.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas akan akuntansi syariah khususnya pada penyajian laporan keuangan di entitas yang berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 335.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan ISAK 335.

2. Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dan memperoleh manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman yang lebih luas lagi bagi peneliti mengenai penyusunan penyajian laporan keuangan pada Masjid yang berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 335.

b. Bagi Masjid Al-Muhajirin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Masjid Al-Muhajirin dalam mengevaluasi, mempertahankan dan mengembangkan hal apa saja yang perlu dievaluasi dan dipertahankan dalam penyajian laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan atau sumber bagi para peneliti selanjutnya.